

DELIK HUKUM

Paripurna KUA & PPAS 2025 untuk Dapat Dibahas dan Disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.DELIKHUKUM.ID

Jul 19, 2024 - 13:17



PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, bersama ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 untuk mendapatkan pembahasan dan

kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan penjelasan Bupati Pangandaran pada Rapat Paripurna DPRD dalam acara Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2025 bertempat di gedung paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, senin (15/07/2024).

Disampaikannya bahwa, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pelaksanaan program kerja tahunan pemerintah daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan merupakan wujud upaya pencapaian visi kabupaten pangandaran, yaitu "pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa".

Tahapan awal proses penganggaran atas perencanaan tahunan adalah penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2025 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

Semoga Rapat Paripurna hari ini dapat dijadikan momentum kesatuan tekad kita dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pangandaran, sehingga proses pembahasan sampai dengan penyepakatan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu "katanya".

Menurut Bupati Jeje, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, KUA dan PPAS harus disampaikan tepat waktu dan memenuhi keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pangandaran.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan tantangan.

Pemerintahan baru hasil pelaksanaan Pilkada 2024, sinkronisasi pada target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan kebijakan dan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Kegiatan-Kegiatan prioritas nasional yang menjadi mandatory spending serta kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan, penurunan kemampuan pembiayaan daerah yang telah menimbulkan utang daerah serta defisit anggaran, sehingga mengharuskan dilakukannya pinjaman daerah agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Sebagai konsekuensi perjalanan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut akan menjadi bagian dari kebijakan belanja daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025.

Mengingat dinamika perkembangan daerah di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian target kinerja akhir yang telah ditetapkan dalam RPJM serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dari rangkaian prioritas pada RPJMD.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pembangunan daerah kabupaten pangandaran tahun 2025 mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Daerah".

Tema pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi, kemandirian, dan persaingan pemerintah kabupaten pangandaran di tingkat provinsi dan nasional dalam berbagai bidang khususnya pada aspek daya saing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Kondisi di atas tentu menjadi tantangan kita pada tahun 2025 yang harus kita sikapi dengan rencana penganggaran yang baik, dengan tujuan utama melanjutkan pembangunan yang di cita-citakan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati, besarnya kebutuhan pendanaan dari APBD sejak tahun 2020 hingga saat ini ke sektor pembangunan

infrastruktur tidak dipandang sebagai beban, namun merupakan investasi yang hasilnya akan kita rasakan pada waktu mendatang. sehingga akan berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten pangandaran.

Demikian pula sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, upaya kolaborasi peningkatan pajak daerah yang mendorong peningkatan bagi hasil pajak yang dikelola pemerintah provinsi serta bantuan keuangan provinsi jawa barat, diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Asumsi kebijakan pendapatan di atas itulah yang menjadi target pada PPAS murni tahun anggaran 2025.

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar 275,22 milyar rupiah dan pendapatan transfer sebesar 666,33 milyar rupiah, sehingga pendapatan daerah ditargetkan mencapai 941,55 milyar rupiah, di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati, sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah kabupaten pangandaran, yaitu “peningkatan daya saing daerah”, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 fokus pada prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui penguatan industri pariwisata sebagai lokomotif pengembangan UMKM, peningkatan iklim investasi, dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudidaya;
2. Penguatan sistem pendidikan kesetaraan, inklusif, berkarakter, dan berbudaya;
3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
4. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang tanggap terhadap bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemerataan wilayah melalui penataan infrastruktur dasar, aksesibilitas serta konektivitas menuju pusat kegiatan strategis;
6. Reformasi birokrasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital serta penguatan kondusifitas daerah dan stabilitas politik.

Arah kebijakan belanja daerah kabupaten pangandaran disusun dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, kerangka

pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pihak swasta, akademisi dan dana umat serta mendorong partisipasi masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 diyakini belum pulih sepenuhnya. dengan asumsi kondisi tersebut, maka belanja modal pada tahun 2025 akan sangat ditunjang dengan belanja dana alokasi khusus dan bantuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Kebijakan belanja di atas membentuk struktur prioritas dan Plafon Anggaran belanja sebesar 919,21 milyar rupiah, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 781,36 milyar rupiah, belanja modal 28,98 milyar rupiah, belanja tidak terduga 6,66 milyar rupiah, dan belanja transfer 102,21 milyar rupiah.

Kebijakan sisi pembiayaan pada tahun 2025 diprediksi akan terbentuk dari sisi efisiensi belanja tahun 2024 dalam bentuk penerimaan silpa belanja. Demikian pula penerimaan pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan belanja dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah diharapkan dapat terselesaikan dan dikelola dengan baik melalui mekanisme portofolio pinjaman yang sampai saat ini sedang proses menunggu turunnya rekomendasi dari 3 Kementerian.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati, demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Tentu kami berharap, sinergitas dengan seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran melalui pembahasan yang komprehensif, akan mampu menyempurnakan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 yang lebih baik, taat azas dan tepat waktu.

Saya meyakini bahwa kita sepakat, tujuan akhir dari KUA-PPAS ini berdampak positif dan bermanfaat yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang lebih baik.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim bersama ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 untuk mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD "katanya".

Tambah Bupati Jeje, demikian, semoga Allah s.w.t. senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk serta kemudahan bagi kita semua.

Billahi taufik wal hidayah,
wassalamu'alaikum wr. wb.
Bupati Pangandaran
ditandatangani secara elektronik oleh:
Bupati Pangandaran
H. Jeje Wiradinata "ujarnya". * (Anton AS)